



AKSI TERORISME ISIS DI MESIR DAN SIKAP INDONESIA

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Tragedi kemanusiaan kembali terjadi saat kelompok teroris ISIS dengan nama Kelompok Sinai Utara melakukan aksi penembakan dan pengeboman saat sholat Jumat di Mesjid Al-Rawdah, Kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir, 24 November lalu. Jumlah korban tewas mencapai 305 orang. Teroris ISIS di Mesir terkonsentrasi di bagian utara Semenanjung Sinai, tetapi serangan-serangan mereka telah menyebar, termasuk ke ibukota, di mana pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di gereja dan markas-markas keamanan. Dalam perang melawan terorisme, Mesir dan Koalisi Antiterorisme Militer Islam (IMCTC) lebih melakukan pendekatan keamanan. Kasus Sinai Utara menunjukkan bahwa perang melawan terorisme tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan. Pendekatan kesejahteraan juga harus dilakukan agar perang melawan terorisme menjadi lebih efektif. Indonesia mengutuk aksi terorisme di Sinai Utara tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme. Belajar dari kasus serangan teroris di masjid Raudah Sinai Utara, DPR perlu meminta kepada Pemerintah agar tidak lengah dalam upaya memerangi terorisme. Pemerintah juga harus terus aktif meningkatkan kerja sama internasional untuk memerangi terorisme dengan diplomasi damai.

Pendahuluan

Tragedi kemanusiaan kembali terjadi saat kelompok teroris ISIS melakukan aksi penembakan dan pengeboman waktu sholat Jumat di Mesjid Al-Rawdah, Kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir (24/11) lalu. Jumlah korban tewas mencapai 305 orang, termasuk 27 anak-anak. Serangan teroris terhadap tempat ibadah di mana warga sipil tengah berkumpul dan kegiatan ibadah tengah berlangsung dinilai sungguh di luar batas perikemanusiaan.

Para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama di seluruh dunia mengutuk serangan biadab tersebut. Dari serangan tersebut dapat diketahui bahwa rantai terorisme ISIS belum mereda, bahkan memperluas wilayahnya dengan kemungkinan membangun basis baru di Sinai Utara, Mesir. Tulisan ini membahas bagaimana ISIS tumbuh di Sinai Utara dan kebijakan Indonesia dalam mengatasi terorisme.

*) Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: apujayanti@yahoo.com



Sinai Utara Mesir Sebagai Basis Baru ISIS

Serangan teroris paling berdarah terjadi di Masjid Al-Raudah di kota Bir el-Abd, sekitar 50 kilometer arah barat kota Al-Arish, Semenanjung Sinai Utara pada Jumat (24/11) yang membawa korban 305 orang tewas. Kelompok IS cabang Sinai Utara yang berafiliasi ISIS dan mem-*baiat* Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpinnya dianggap bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Berdiri tahun 2011, kelompok yang sebelumnya bernama *Ansar Beit al-Maqdis* ini tumbuh di wilayah Sinai dan dikenal sebagai sayap ISIS di Mesir dengan nama “Kelompok Wilayah Sinai”. Aksi kelompok tersebut semakin gencar sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Mohamed Morsi pada bulan Juli 2013.

Teroris ISIS di Mesir terkonsentrasi di bagian utara Semenanjung Sinai, tetapi serangan-serangan mereka telah menyebar, termasuk ke ibukota, di mana pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di gereja dan markas-markas keamanan. Mesir berada di bawah situasi darurat sejak April, setelah pelaku serangan bunuh diri megebom dua gereja di sebelah utara Kairo, menewaskan sejumlah warga Kristen. Kelompok ini juga memiliki target korban pasukan keamanan Mesir dalam sebagian besar serangan mereka, namun mereka juga berupaya melakukan ekspansi ke luar Semenanjung Sinai dengan menyerang gereja-gereja Kristen Mesir dan para peziarah. Kelompok wilayah Sinai juga menargetkan penduduk lokal yang mereka tuduh bersekongkol dengan pemerintah, terutama kelompok sufi yang juga dianggap melakukan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kaum sufi Mesir banyak berdiam di kawasan Sinai. Perilaku dan sikap kaum Sufi yang menjadi korban serangan tersebut dikenal sangat menjauhi dunia politik dan lebih berkonsentrasi pada aktivitas ibadah murni dengan sikap *zuhud* dan cenderung tidak peduli dengan urusan dunia. Kaum sufi menolak tegas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal terhadap negara dan pemerintah Mesir selama ini. Oleh karena itu, kota Bir el-Abd di mana mayoritas penduduknya merupakan kaum sufi ini dikenal sebagai kota yang paling tenang di Semenanjung Sinai Utara. Sikap kaum sufi yang sangat menolak aksi kekerasan sangat bertentangan dengan kelompok Wilayah Sinai.

Serangan terhadap kaum sufi di wilayah Sinai berulang kali terjadi, antara lain pembunuhan tokoh ulama sufi dan meledakkan musoleum ulama sufi.

Pemerintah Mesir berhasil menguasai kembali Semenanjung Sinai dari Israel pada tahun 1982. Namun Mesir tidak segera membangun wilayah itu, bahkan cenderung membiarkannya sehingga tertinggal dibandingkan wilayah lain di Mesir. Menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, kondisi daerah Semenanjung Sinai sangat cocok dijadikan tempat membangun dan mengembangkan basis kelompok milisi. Dari sisi geopolitik, Sinai merupakan daerah perbatasan Mesir dengan Israel dan jauh dari jangkauan militer Mesir. Sinai juga dihuni beberapa suku independen yang menentang kebijakan Pemerintahan Presiden Abdel Fatah el-Sisi. Dengan melihat faktor-faktor tersebut terdapat peluang bagi kelompok milisi bersenjata, yang mengklaim sebagai bagian dari ISIS, untuk membangun basis sekaligus melakukan rekrutmen anggota di sana. Sinai menjadi alternatif basis ISIS yang baru di saat keberadaan ISIS di Irak dan Suriah semakin terkikis. Lemahnya kontrol keamanan oleh otoritas Mesir di Sinai memudahkan kelompok milisi untuk mendapatkan pasokan senjata.

Kerja Sama Internasional Koalisi Antiterorisme Militer Islam (IMCTC)

Serangan terorisme di masjid Rawda, Sinai Utara menjadi perhatian global. Demikian pula cara pemerintahan Abdel Fatah al-Sisi dalam mengatasi ancaman tersebut. Pasca-serangan, Pemerintah Mesir menetapkan *State of Emergency* dan membalas dengan serangan militer ke daerah basis ISIS di Sinai. Serangan militer tersebut mempertajam perlawanan Mesir terhadap pemberontakan yang telah melonjak sejak 2013, setelah Pemerintahan Abdul Fattah al-Sisi berkuasa melalui sebuah kudeta militer.

Bagi sejumlah analis, pembalasan militer yang dilakukan Pemerintah Mesir terhadap kelompok teroris Sinai utara dianggap tidak cukup. Pihak militer Mesir diharapkan lebih melindungi penduduk dan mengamankan wilayah tersebut. Saat ini tentara Mesir lebih banyak ditempatkan pada pos pemeriksaan di jalan-jalan wilayah dan bukan mengamankan pusat-pusat keramaian dan tempat perekonomian dilumpuhkan. Sekutu-sekutu

Mesir menilai militer Mesir telah membuat kemajuan dalam meredam pemberontakan dan memaksa kelompok *Islamic* (IS) untuk mengubah strategi mereka. Serangan berskala besar terhadap militer semakin jarang terjadi karena IS semakin beralih pada sasaran warga sipil di pinggir jalan atau di tempat umum.

Mesir merupakan anggota Koalisi Antiterorisme Militer Islam (IMCTC). Anggota IMCTC berdiri tahun 2015 secara resmi terdiri dari 41 negara, tidak termasuk Indonesia. IMCTC mendukung pendekatan keamanan Mesir dalam perang total terhadap terorisme. Pembentuk aliansi, Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, berjanji untuk melenyapkan teroris dari muka bumi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Namun, selama ini fungsinya dinilai baru di atas kertas. Dalam pertemuan terakhir IMCTC di Riyadh pasca-serangan Sinai, telah dibahas strategi, tata kelola, aktivitas, dan rencana masa depan IMCTC. Termasuk mengizinkan anggota untuk mengizinkan dan meminta bantuan satu sama lain untuk memerangi militan. Bantuan tersebut termasuk kebutuhan militer, keuangan, peralatan atau keahlian keamanan, serta membantu memerangi pendanaan dan ideologi teroris.

Di lain pihak pendekatan pemerintah Mesir dalam melawan terorisme dinilai para pengamat internasional sudah usang. Selama beberapa dekade Mesir melihat Semenanjung Sinai melalui prisma militer dan melakukan pendekatan agresif terhadap penduduk lokal yang teralienasi. Pemerintah memilih melakukan pendekatan militer tanpa menawarkan pemecahan masalah sosial ekonomi, termasuk pengangguran kronis, buta huruf, dan akses terhadap kesehatan yang buruk di wilayah tersebut. Kondisi yang berakar pada pengabaian historis Kairo di Sinai tersebut membangun dukungan penduduk lokal terhadap ISIS.

Sikap Indonesia

Pemerintah Indonesia mengutuk serangan teroris di Masjid Raudah di El-Arish, Sinai Utara dan menyampaikan duka cita dan simpati yang sangat dalam terhadap para korban. Dalam tragedi di Sinai Utara tidak terdapat korban WNI, namun Kedubes Indonesia di Kairo telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan setempat dan terus memantau perkembangan situasi di El-Arish. WNI di Mesir telah dihimbau untuk

melakukan langkah antisipatif dan preventif, antara lain selalu membawa tanda pengenal dan menunda bepergian ke luar kota, khususnya ke Sinai Utara.

Pemerintah Mesir telah menetapkan *State of Emergency* sehingga berhak menangkap orang yang dicurigai tanpa proses peradilan yang panjang dan telah meningkatkan upaya-upaya untuk menjamin keamanan warga Mesir dan warga asing di Mesir. Beberapa mahasiswa Indonesia pernah ditangkap dan dideportasi karena diduga terlibat dalam kegiatan politik yang dilarang pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir telah mengeluarkan surat edaran yang meminta mahasiswa Indonesia di Mesir berhati-hati. Meski kondisi mahasiswa Indonesia di Mesir aman, PPMI menghimbau penerapan *buddy system*, yaitu bepergian setidaknya berdua sebagai pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu mengikuti instruksi Kedubes RI di Kairo mengenai perkembangan keamanan di Mesir.

Mesir selama ini memang menjadi salah satu negara tujuan belajar bagi mahasiswa Indonesia. Jumlah WNI di Mesir saat ini diperkirakan 4.000-5.000 orang, sebagian besar tengah melanjutkan studinya di Universitas Al Azhar Mesir karena mendapat beasiswa dari pemerintah Mesir. Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir memiliki komitmen untuk memberikan beasiswa kepada lebih dari 20 mahasiswa asal Indonesia setiap tahun.

Meskipun bukan anggota IMCTC, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk bersama Mesir dalam menghadapi situasi yang sulit ini karena kerja sama internasional dalam rangka memerangi terorisme dan radikalisme yang menjadi kewajiban bersama negara-negara dunia. Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Selama ini, Indonesia telah berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*.

Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar *United Nations Global Counter-Terrorism*

Strategy (UNGCTS). Peran penting Indonesia dalam penanggulangan terorisme internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dari Dewan Penasihat *UN Counter-Terrorism Center* periode 2015-2018.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya hukum internasional dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional. Terkait isu *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*, Indonesia merupakan *co-sponsor* dari Resolusi DK PBB 2178 (2014) yang meminta negara-negara untuk melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam penanganan isu FTF, termasuk pencegahan rekrutmen dan fasilitasi keberangkatan para FTF, pengawasan perbatasan, saling tukar informasi, serta program rehabilitasi dan reintegrasi. Lebih lanjut, Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah *regional workshop* dan konferensi internasional yang melibatkan banyak negara untuk saling bertukar informasi dan *good practices*, serta peluang penguatan kerja sama internasional dalam penanganan isu FTF.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme sejalan dengan pemikiran banyak pihak di dalam negeri, dan kepentingan nasional Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia yang dilakukan dengan cara-cara damai. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia sering diminta oleh para tokoh dari organisasi kemasyarakatan terkemuka di dalam negeri untuk menggalang solidaritas kemanusiaan dan kerja sama internasional dalam memerangi terorisme. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, meminta Pemerintah Indonesia memelopori penyelenggaraan pertemuan negara-negara Islam untuk melawan ancaman terorisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. MUI juga menegaskan bahwa tempat ibadah harus menjadi zona netral manakala terjadi konflik dan menjadi pusat perlindungan kemanusiaan yang seharusnya terlarang untuk terjadinya kejahatan apa pun.

Penutup

Belajar dari kasus serangan teroris di masjid Raudah Sinai Utara, DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dimiliki perlu

mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam upaya memerangi terorisme, baik secara internal maupun melalui kerja sama internasional. Upaya memerangi terorisme harus dilakukan dengan cara-cara damai dan jalur diplomasi, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian mencari solusi atas akar permasalahan dari terorisme tersebut. Upaya memerangi terorisme tidak hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, terutama di daerah perbatasan dan terpencil yang jauh dari jangkauan pengawasan aparat keamanan, karena rentan dari aktivitas penyusupan pihak asing.

Referensi

- Saptaatmaja, Tom. "Teror Mesir, Paus Fransiskus, dan Islam", *Suara Pembaruan*, 28 November 2017, hlm. 12.
- "Muslim Sufi Mesir Tidak Gentar", *Media Indonesia*, 28 November 2017, hlm. 14.
- "Mesir – Peta Baru Pertarungan", *Kompas*, 28 November 2017, hlm. 8.
- "Negara Muslim Dukung Dunia Perangi Terorisme", *Suara Pembaruan*, 27 November 2017, hlm. 14.
- "Mahasiswa RI di Mesir Diminta Berhati-hati", *Republika*, 27 November 2017, hlm. 1.
- "Sinai Jadi Basis Alternatif ISIS", *Republika*, 27 November 2017, hlm. 9.
- "Mempertanyakan Strategi Militer Mesir di Sinai", *Media Indonesia*, 29 November 2017, hlm. 14.
- "Sinai, Militansi, dan Militerisme", *Media Indonesia*, 27 November 2017, hlm. 14.
- "Indonesia Mengutuk Serangan Masjid di Sinai", *Republika*, 26 November 2017, hlm. 1.
- "Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme", <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terrorisme.aspx>, diakses 29 November 2017.
- "Dua Mahasiswa Indonesia Dideportasi", <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170902/281706909823390>, diakses 29 November 2017.